

BAB 1 PENDAHULUAN

Pada bab pertama ini, penulis ingin menjabarkan latar belakang dari topik yang dibahas oleh penulis yaitu mengenai propaganda media massa Amerika Serikat yang berdampak kepada opini publiknya. Opini publik tersebut diperlukan pemerintah Amerika Serikat untuk mendukung kebijakan luar negerinya. Merupakan suatu fenomena yang unik bagi penulis dikarenakan peran sebuah media massa seharusnya “netral“, namun pada kenyataannya hampir semua media massa yang ada memiliki keberpihakan atau kepentingan dengan suatu kelompok tertentu. Dari sekian banyak media massa yang ada, penulis memilih menggunakan salah satu media massa televisi di Amerika Serikat yang memiliki peranan besar dalam mempengaruhi opini publik warga negaranya. Opini warga negara Amerika Serikat tersebut menjadi sebuah kebutuhan untuk melancarkan kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Kemudian dalam bab-bab berikutnya penulis akan menjelaskan secara bertahap propaganda yang dilakukan oleh media massa tersebut sampai kepada analisisnya dan pada akhirnya dalam bab 4, penulis akan memberikan kesimpulan dari keseluruhan penulisan ini.

1.1 Latar Belakang Masalah

Kebijakan luar negeri Amerika Serikat merupakan hasil dari faktor-faktor yang terjadi di dalam negeri maupun internasional.¹ Kebijakan luar negeri akan mengalami perubahan sesuai dengan kebutuhan prioritas negara tersebut.² Keith Porter menulis untuk situs About.com perihal kebijakan luar negeri Amerika Serikat.³ Dalam tulisannya Porter menceritakan bahwa di dalam Konstitusi Amerika Serikat tidak dijelaskan mengenai kebijakan luar negeri Amerika Serikat namun terdapat penjelasan tentang siapa yang bertanggung jawab atas hubungan resmi

¹ Joyce P. Kaufman. *A Concise History of U.S. Foreign Policy*. Rowman&Littlefield publishers, inc. United Kingdom. 2006. h.4

<<http://books.google.co.id/books?id=luc5eUxdAIAC&printsec=frontcover&dq=history+of+foreign+policy&hl=en#v=onepage&q=&f=false>> (diakses 05 Desember). Diterjemahkan oleh penulis.

² Ibid.

³ About.com. Keith Porter. *Who Makes U.S. Foreign Policy?*

<<http://usforeignpolicy.about.com/od/backgroundhistory/a/whomakesforpol.htm>> (dikases 05 Desember 2009). Diterjemahkan oleh penulis.

Amerika Serikat dengan dunia. Lebih lanjutnya Porter menjelaskan di dalam Artikel II Konstitusi Amerika Serikat dikatakan bahwa Presiden Amerika Serikat memiliki predikat sebagai “*commander-in-chief of the military*” sehingga Presiden mempunyai kewenangan untuk mengatur hubungan interaksi Amerika Serikat dengan dunia. Namun, kewenangan tersebut bukan berarti Presiden Amerika Serikat memiliki otoritas untuk membuat kebijakan luar negeri secara bebas, kebijakan luar negeri yang telah dikeluarkan Presiden tetap harus melalui persetujuan Kongres.⁴

Pada dasarnya banyak aktor yang terlibat dalam pembuatan kebijakan luar negeri Amerika Serikat selain dewan eksekutif. Diantaranya terdapat NGO’s, Think Tanks⁵, pemerintahan negara bagian, dan opini publik. Dengan perubahan jaman, media massa turut memiliki andil dalam kebijakan luar negeri Amerika Serikat, hal ini berkaitan dengan opini publik. Kemajuan teknologi membuat aliran informasi dari media massa tersiar selama 24 jam sehari dan dapat diakses di seluruh penjuru dunia, informasi tersebut tidak lagi dapat tersaring oleh kepentingan diplomasi seperti era terdahulu. Media massa (khususnya televisi) dapat mempengaruhi agenda kebijakan luar negeri Amerika Serikat.⁶

Patrick O’Heffernan mengulas hasil penelitian yang dilakukan oleh Bernard Cohen dalam bukunya “*The Press and Foreign Policy*”, Cohen menemukan bahwa terdapat hubungan erat antara media massa dengan kebijakan luar negeri Amerika Serikat.⁷ Selain itu, Cohen juga menemukan bahwa media massa sering membantu pemerintah mencapai tujuan kebijakan luar negerinya dan pemerintah Amerika Serikat menjadikan media massa sebagai alat untuk menyampaikan cerita resmi

⁴ ThisNation.com. *Foreign Policy*. <<http://www.thisnation.com/foreign.html>> (diakses 05 Desember 2009). Diterjemahkan oleh penulis.

⁵ Think Tanks merupakan organisasi, kelompok maupun individu yang melakukan penelitian untuk membantu pemikiran politik negara. <<http://www.columbia.edu/cu/lweb/indiv/lehman/guides/ttanks.html>> (diakses 05 Desember 2009). Diterjemahkan oleh penulis.

⁶ Warren P. Strobel. *The Role of the News Media in Foreign Policy Debates*. <http://nagoya.usconsulate.gov/wwwforpol_804.html> (diakses 05 Desember 2009). Diterjemahkan oleh penulis.

⁷ Patrick O’Heffernan. *Mass media and American foreign policy*. Ablex Publishing Cooperation. USA. 1991. h.xi <http://books.google.co.id/books?id=Ej-NQUEJRUC&dq=The+Media%27s+Role+in+U.S.+Foreign+Policy&printsec=frontcover&source=in&hl=en&ei=YRMcS-iTHYHm7APGtfHNDw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=11&ved=0CDIQ6AEwCg#v=onepage&q=The%20Media%27s%20Role%20in%20U.S.%20Foreign%20Policy&f=false> (diakses 05 Desember 2009). Diterjemahkan oleh penulis.

pemerintah kepada publik yang dikemas sesuai dengan keinginan pemerintah.⁸ Dari hubungan media massa dan kebijakan luar negeri tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa yang menyatukan keduanya adalah opini publik. Opini publik mempunyai pengaruh terhadap kebijakan luar negeri.⁹ Dengan demikian, media massa memiliki peranan dalam perubahan hubungan internasional.

Perubahan dalam hubungan internasional sangat terasa setelah bubarnya Uni Soviet pada tahun 1991 atau berakhirnya Perang Dingin. Isu keamanan yang dulunya diidentikkan berasal dari ancaman langsung antar negara dengan serangan senjata kini bergeser menjadi suatu ketakutan yang berlebihan yang selalu mengikat dalam akal manusia. Ketakutan yang penulis maksud adalah ketakutan yang timbul tidak dikarenakan adanya sebuah ancaman langsung (*direct threat*) melainkan ditemukannya indikasi-indikasi yang dapat mengancam pertahanan maupun keamanan suatu negara sehingga menjadi suatu ketakutan. Ketakutan semacam ini dapat mengakibatkan gangguan terhadap kestabilan dalam Hubungan Internasional.

Terorisme adalah salah satu alasan ketakutan yang dapat menyebabkan suatu negara bertindak anarkis demi menjaga keamanan negaranya dari negara lain atau kelompok lain yang dianggap melakukan kegiatan teror atau bekerjasama dengan kelompok teroris. Perang Irak tahun 2003 menjadi contoh ketakutan Amerika Serikat akan bayangan terorisme (dibawah pemerintahan Saddam Hussein). Irak pada saat itu tidak melakukan ancaman langsung terhadap Amerika Serikat. Namun, Amerika Serikat menjadikan Irak sebagai “musuh” yang perlu ditindak lanjuti karena mendapati laporan dari intelijen Amerika Serikat adanya indikasi kuat yang menjadikan Irak sebagai ancaman untuk Amerika Serikat bahkan untuk dunia.

Perang Irak tahun 2003 menjadi tanda tanya besar bagi rakyat internasional hingga hari ini, perihal senjata pemusnah masal yang diduga dimiliki oleh Irak, sampai hari ini tidak bisa dibuktikan. Namun meskipun demikian, pada tahun 2003, Amerika Serikat telah melakukan penyerangan terhadap Irak. Amerika Serikat berhasil menangkap dan menyidangkan Saddam Hussein. Langkah Amerika Serikat selanjutnya adalah menggulingkan pemerintahan Saddam Hussein dan menyusun

⁸ Ibid..

⁹ Alexander Todorov & Anesu N. Mandisodza, *Public Opinion on Foreign Policy: The Multilateral Public that Perceives Itself as Unilateral*.
<http://www.wss.princeton.edu/~policybriefs/todorov_opinion.pdf> (diakses 24 Pebruari 2009).
Diterjemahkan oleh penulis.

kembali pemerintahan Irak. Perang Irak tahun 2003 diawali oleh kecurigaan Amerika Serikat terhadap Irak, beberapa informasi yang berhasil dikumpulkan oleh intelijensi Amerika Serikat menyatakan antara lain¹⁰:

1. Irak memiliki senjata pemusnah massa atau *Weapons of Mass Destruction* (WMD);
2. Saddam Hussein menindas rakyatnya;
3. Saddam Hussein diyakini memiliki hubungan kerjasama yang erat dengan kelompok teroris Al-Qaeda (kelompok teroris yang mengaku melakukan penyerangan 11 September 2001).

Poin pertama dan ketiga diatas menjadi alasan kuat Amerika Serikat mengambil tindakan terhadap Irak. Terorisme menjadi penting untuk diberantas oleh pemerintah Amerika Serikat sejak kejadian serangan 11 September 2001, insiden teror itu menjadi titik perubahan kebijakan luar negeri Amerika Serikat¹¹, perubahan kebijakan luar negeri Amerika Serikat tersebut memprioritaskan perlawanan terhadap segala bentuk organisasi terorisme baik yang ada dalam negeri maupun terorisme internasional. Amerika Serikat juga akan melawan negara-negara atau kelompok maupun individu yang mendukung, membantu, melindungi dan mengembangkan organisasi terorisme.¹²

Publik Amerika Serikat merasa sangat terpukul setelah terjadinya tragedi 11 September 2001. Hampir seluruh warga negara Amerika Serikat terkena *syndrome* trauma atas insiden tersebut. *Syndrome* ini menjadikan warga negara Amerika Serikat merubah kegiatan yang biasa mereka lakukan dan publik Amerika Serikat menjadi sangat perhatian menyangkut segala pemberitaan mengenai terorisme. Keterangan tersebut penulis dapatkan dari sebuah hasil survei studi MARS tahun 2002 yang merupakan *mail survey* terdiri dari 22.097 orang dewasa dari 50 negara

¹⁰ Congressional Reports: Report of the Select Committee on Intelligence on the U.S. Intelligence Community's Prewar Intelligence Assessments on Iraq. <<http://www.gpoaccess.gov/serialset/creports/iraq.html>> (diakses 11 Maret 2009). Diterjemahkan oleh penulis.

¹¹ James S. Robbins, *National Review Online*. 11 September 2008. <http://www.afpc.org/publication_listings/viewArticle/366> (diakses 11 Maret 2009). Diterjemahkan oleh penulis.

¹² Ibid.

bagian di Amerika Serikat pada jangka waktu Januari 2002 – Maret 2002,¹³ hasil survei tersebut menunjukkan presentasi yang besar, yaitu diatas 20% penduduk yang mengikuti perkembangan isu terorisme.

Setiap pemberitaan di televisi menyangkut tragedi 11 September 2001 menjadi berita utama. Pemberitaan mengenai hubungan negara Irak dengan terorisme menjadi isu hangat pada pertengahan tahun 2002 . Presiden Bush menjadikan Irak isu utama dalam rapat di senat, tepatnya pada 16 Oktober 2002, Bush mengajukan resolusi Irak untuk disetujui Kongres beserta senat dan didalam resolusi Irak juga tercantum laporan Intelijen Amerika Serikat mengenai dugaan adanya senjata pemusnah masal dan program pengembangannya di Irak¹⁴. Dalam resolusi Irak, dinyatakan faktor-faktor yang menjadi alasan Amerika Serikat harus mengambil tindakan terhadap Saddam Hussein (pemimpin Irak pada masa itu).

Pemberitaan Irak menjadi perdebatan panjang dan publik Amerika Serikat terus mengikuti perkembangan laporan intelijen Amerika Serikat. Media massa memiliki peranan kuat dalam pemberitaan Irak, untuk membuat suatu “*packaging*” yang membentuk “*image*” atau citra Irak dimata publik. Di Amerika Serikat, hampir seluruh media massa memberitakan perihal Irak dan perdebatan yang terjadi di senat atas resolusi yang diajukan oleh Presiden Bush. Trauma yang telah dialami warga negara Amerika Serikat membuat mereka mendukung segala bentuk tindakan pemerintahannya yang dapat memberantas kegiatan terorisme. Gencarnya pemberitaan Irak dan dengan terbentuknya “*image*” Irak yang negatif yaitu sebagai negara yang memiliki WMD dan bekerja sama dengan kelompok terorisme Al-Qaeda membuat sebagian besar publik Amerika Serikat pada akhirnya merubah opininya menjadi setuju terhadap resolusi Irak.

Propaganda dibutuhkan pemerintahan George W. Bush untuk menaikan dukungan publik terhadap resolusi Irak karena pada awal resolusi dikeluarkan, sebagian besar publik tidak yakin adanya keterkaitan Irak dengan tragedi 11

¹³ Roland Soong. *9/11 Effects in the USA*. 18 Juli 2002 <<http://www.zonalatina.com/Zldata248.htm>> (diakses 11 Maret 2009). Diterjemahkan oleh penulis.

¹⁴ Public Law 107-243—OCT. 16, 2002. *Authorization For Use of Military Force Against Iraq Resolution Of 2002*. <<http://www.c-span.org/Content/PDF/hjres114.pdf>> (diakses 11 Maret 2009). Diterjemahkan oleh penulis.

September 2001 dan tidak meyakini benar adanya WMD di Irak.¹⁵ Poling yang menunjukkan keberhasilan propaganda Amerika Serikat dalam memberikan “*image*” ke publik, yaitu: “*we are good and they are bad*” dapat dilihat dari poling pada pertengahan awal tahun 2002 menghasilkan hanya 1/3 penduduk Amerika Serikat yang mendukung penyerangan dilakukan tanpa adanya dukungan PBB dan 2/3 penduduk Amerika Serikat melawan keputusan tersebut.¹⁶ Kemudian jumlah tersebut berubah pada tiga bulan awal tahun 2003 (menjelang penyerangan Irak bulan Maret 2003), poling yang dilakukan oleh Zogby International, ABC News dan CBS News/New York Times menunjukkan dukungan publik terhadap kebijakan Bush menyerang Irak meningkat menjadi separuh penduduk Amerika Serikat.¹⁷

Opini publik berhasil dibentuk dengan membuat pencitraan Irak yang negatif oleh media massa. Pencitraan seperti menyatakan keterkaitan Irak dengan kelompok terorisme Al-Qaeda menjadikan Irak sebagai ancaman dimata publik Amerika Serikat. Kelompok teroris Al-Qaeda ini merupakan kelompok yang mengaku bertanggung jawab atas insiden yang terjadi di Amerika Serikat pada 11 September 2001¹⁸, sehingga kelompok teroris Al-Qaeda merupakan kelompok yang paling ditakutkan oleh pemerintahan dan juga publik Amerika Serikat. Hubungan antara Irak dan kelompok Al-Qaeda tersebut masih merupakan dugaan dari kelompok intelijen Amerika Serikat. Belum ada bukti kuat yang menyatakan Irak mendukung kerja kelompok teroris tersebut, sehingga bisa dikatakan Irak belum tentu berada dibalik serangan 11 September 2001 yang menyerang WTC Amerika Serikat. Namun media massa berhasil mempengaruhi opini publik warga Amerika Serikat dengan memberikan kesan kepada publik bahwa Irak merupakan ancaman dan harus ditindak-lanjuti. Peran media massa disinilah yang dianggap menarik oleh penulis.

¹⁵ David Barstow. *Behind TV Analysts, Pentagon's Hidden Hand*. <http://www.nytimes.com/2008/04/20/us/20generals.html?_r=1> (diakses 06 November 2009). Diterjemahkan oleh penulis.

¹⁶ PollingReport.com. *Iraq(p.6)*. <<http://web.archive.org/web/20030803014635/http://www.pollingreport.com/iraq6.htm>> (diakses 15 November 2009). Diterjemahkan oleh penulis.

¹⁷ PollingReport.com. *Iraq(p.3)*. <<http://web.archive.org/web/20030412202804/http://www.pollingreport.com/iraq3.htm>> (diakses 15 November 2009). Diterjemahkan oleh penulis.

¹⁸ Department of Defens News. Fred W. Baker III. *Al Qaeda Operative Admits to Masterminding 9/11 Attacks*. <<http://www.defenselink.mil/news/newsarticle.aspx?id=32456>> (diakses 23 Maret 2009). Diterjemahkan oleh penulis.

Keberhasilan media massa membentuk opini publik dengan teknik-teknik propaganda untuk membantu pemerintah melancarkan kebijakan luar negeri menyerang Irak.

Pada dasarnya, media massa adalah alat komunikasi yang fungsinya untuk menghibur, menginformasikan, menanamkan nilai, menanamkan kepercayaan dan menanamkan kode-kode perilaku yang akan mengintegrasikan media massa ke dalam struktur institusional yang lebih luas¹⁹. Alat komunikasi ini oleh masyarakat modern dimanfaatkan sebagai sumber informasi utama mereka. Media massa membutuhkan berita dan informasi untuk publikasinya baik untuk kepentingan media itu sendiri maupun untuk kepentingan orang atau institusi lainnya; di lain pihak, manusia membutuhkan adanya pemberitaan, publikasi untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Media massa menyampaikan informasi yang dapat membentuk, mempertahankan atau mendefinisikan citra, sehingga media massa memiliki peranan yang sangat penting dalam membentuk opini publik.

Dalam kasus invasi Amerika Serikat terhadap Irak tahun 2003, media massa dijadikan alat utama Amerika Serikat dibawah pemerintahan Bush untuk membuat suatu *image building* yang dapat membentuk opini publik. Opini publik ini dibutuhkan untuk kepentingan mendukung resolusi Irak tahun 2002. Terlepas dari apapun motif sebenarnya dibalik perang Irak tahun 2003, apabila Bush (melalui propaganda media massa) berhasil membangun *image* yang tepat dimata publik maka publik akan mendukungnya. Terlebih lagi, isu terorisme merupakan isu yang sensitif mengingat kejadian 11 September 2001, sehingga memudahkan media massa membentuk opini publik terhadap Irak. Media massa yang dipilih penulis sebagai unit analisa dalam penelitian ini adalah media massa Fox News yang merupakan salah satu media massa yang paling tidak netral atau kata lain media massa yang bias atau berpihak dalam pemberitaannya. Fox News merupakan media massa atau organisasi yang “sayap kanan“ mendukung kelompok Republik. Presiden Bush adalah presiden yang diangkat mewakili kelompok Republik, sehingga Fox News melakukan propaganda untuk mendukung keputusan Bush tersebut. Penjelasan perihal sejarah Fox News sebagai organisasi “sayap kanan“ akan dijelaskan penulis dalam bab berikutnya.

¹⁹ James Curran dan Jean Seaton, *Power Without Responsibility: The Press and Broadcasting in Britain*, 2d ed. London: Methuen, 1985. h. 24.

Penulis menekankan pada media massa Fox News berdasarkan hasil temuan survei *polling* dari PIPA²⁰ yang dilakukan pada tahun 2003²¹, setelah terjadinya invasi Amerika Serikat ke Irak pada tahun 2003. *Polling* ini menunjukkan bahwa masyarakat Amerika Serikat 30% menonton dua atau lebih jaringan, **18% menonton Fox**, 16% menonton CNN, 14% menonton NBC, 11% menonton ABC, 9% menonton CBS, dan 3% menonton PBS/NPR. Presentasi penonton Fox News terhitung besar dan dari *polling* tersebut juga ditemukan hasil survei yang menunjukkan bahwa Fox News merupakan sumber berita yang memiliki penonton yang paling banyak salah persepsi. **8% penonton Fox News memiliki setidaknya satu orang yang salah persepsi.**²² Faktor pendukung lainnya mengapa penulis memilih Fox News untuk dijadikan unit analisa adalah karena Fox News merupakan media massa *right wing*²³. Fox News sebagai media massa yang *right wing* memiliki kepentingan untuk menyampaikan berita dan informasi yang konservatif dan pro-pemerintahan Bush. Hal ini dilatarbelakangi oleh hubungan antara Presiden Fox News (Roger Ailes) yang merupakan kepala konsultan media mantan Presiden George Herbert Walker Bush.²⁴

Media massa Fox News digunakan Amerika Serikat sebagai alat propagandanya. Propaganda dalam pengertian sesuai praktek media ialah, bagaimana manipulasi data dan fakta, untuk mendapatkan opini publik sehingga publik bersikap dan bertindak sejalan dengan kepentingan pihak yang menggunakan media massa tersebut sebagai alat. Masyarakat dianggap telah ikut serta dalam propaganda apabila bekerja kepada mereka yang mampu merekayasa persetujuan dengan akses ke ranah

²⁰ Program on International Policy Attitudes (PIPA) disahkan pada tahun 1992 dengan tujuan sebagai wadah untuk opini publik menyangkut hubungan internasional. PIPA melakukan penelitian mendalam mengenai opini publik yang menyangkut poling dan kelompok-kelompok wawancara. PIPA menggabungkan penemuannya dengan organisasi-organisasi lainnya. PIPA secara aktif mencari kerjasama dengan komuniats kebijakan publik dalam mengembangkan polingnya agar nantinya memiliki pengaruh terhadap pembuat kebijakan publik. PIPA merupakan rogram gabungan dari Center on Policy Attitudes (COPA) dan Center for International and Security Studies at Maryland (CISSM). <<http://www.pipa.org/>> (diakses 27 Desember 2009). Diterjemahkan oleh penulis.

²¹ Steven Kull, *Misperceptions, The Media, And the Iraq War*. PIPA/KN Poll: The Center on Policy Attitudes. Oktober 2003.

<http://www.pipa.org/OnlineReports/Iraq/IraqMedia_Oct03/IraqMedia_Oct03_rpt.pdf> (diakses 11 Maret 2009). Diterjemahkan oleh penulis.

²² Ibid.

²³ Dalam politik, istilah *right-wing* digunakan sebagai istilah untuk posisi konservatif. Kini istilah *right wing* digunakan untuk mendiskripsikan kelompok-kelompok yang menekankan tradisi, fundamentalisme, dan/atau nasiaonalis. <www.answers.com/topic/right-wing-politics> (diakses 11 Maret 2009)

²⁴ Roger Alies <<http://www.nndb.com/people/449/000054287/>> (diakses 13 Maret 2009)

politik, sumber daya yang dimilikinya, serta akses media massanya.²⁵ Propaganda politik melalui media massa pada dasarnya, merupakan upaya pengemasan isu, tujuan, pengaruh, dan kekuasaan politik dengan memanipulir psikologi publik.²⁶ Kepentingan politik baik yang berupa permintaan dukungan, isu atau kejadian politik yang dikemas menjadi berita untuk media massa, memanipulasi aspek psikologis massa.

Fox News melakukan propaganda melalui berbagai cara, salah satu cara yang sangat mencolok bagi penulis adalah dalam wawancara-wawancara media massa Fox News. Penulis memfokuskan analisis penelitian ini nantinya pada beberapa wawancara yang dilakukan Fox News menjelang perang Irak 2003. Penulis menilai wawancara yang dilakukan Fox News dalam masa periode tertentu memiliki potensi yang besar untuk membentuk opini publik, hal ini tentu dilatarbelakangi oleh beberapa faktor. Penjelasan mengenai faktor-faktor tersebut akan penulis paparkan pada bab 3 (bab analisis) beserta analisis penulis mengenai berbagai cara dan/atau teknik propaganda yang dilakukan oleh Fox News pada tahun 2002 hingga menjelang invasi di bulan Maret 2003 menyangkut perang berdasarkan data-data yang telah dihimpun. Propaganda untuk membentuk opini publik tersebut menjadi penting untuk dunia politik Amerika Serikat, khususnya dibawah pemerintahan Bush.²⁷

Dunia politik di Amerika Serikat tidak bisa melepaskan diri dari keberadaan media massa. Publikasi lewat media massa baik cetak maupun elektronik tentang hal-hal yang berkait dengan kepentingan-kepentingan politik dalam maupun luar negeri Amerika Serikat baik secara langsung maupun tidak langsung sangat dibutuhkan dan diperlukan oleh para praktisi maupun akademisi bidang politik Amerika Serikat. Hal ini erat kaitannya dengan serangan Amerika Serikat ke Irak tahun 2003. Amerika Serikat menggunakan media massa sebagai alat propogandanya untuk mendapatkan dukungan publik terhadap resolusi Irak tahun 2002.²⁸ Dukungan atau opini publik ini menjadi masukan untuk kebijakan Amerika Serikat dan dibutuhkan untuk menunjukkan demokratisasi Amerika Serikat terhadap publiknya

²⁵ lihat: Noam Chomsky dan Edward S. Herman, *Manufacturing Consent: The Political Economy of the Mass Media*, 2d ed. Australia, 1994.

²⁶ Ibid.

²⁷ David Barstow. *Loc. cit.*

²⁸ Ibid.

dan juga terhadap dunia. Amerika Serikat ingin menunjukkan bahwa dalam kebijakannya dilakukan dengan proses demokrasi yang baik.

Kebijakan luar negeri Amerika Serikat tidak terlepas dari opini publiknya. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Alexander Todorov dan Anesu N. Mandisodza dari Universitas Princeton mencoba menjawab dua pertanyaan mengenai hubungan opini publik dengan kebijakan luar negeri Amerika Serikat dalam sebuah laporan yang berjudul “*Public Opinion on Foreign Policy: The Multilateral Public that Perceives Itself as Unilateral*”²⁹, kedua pertanyaan itu adalah:

- “Apakah orang Amerika menyalah artikan opini publik untuk kebijakan luar negerinya?” dan
- “Apakah salah persepsi tersebut menimbulkan peningkatan dukungan untuk kebijakan yang sebenarnya disokong oleh minoritas orang Amerika?”.

Penelitian tersebut oleh Todorov dirasa penting karena menyangkut perilaku dari baik publik maupun kebijakan luar negeri di Amerika. Orang-orang yang salah mengartikan opini publik yang dianggap sebagai pandangan *unilateral* cenderung mendukung kebijakan luar negeri yang khususnya *unilateral* dan orang-orang yang secara tepat mengintrepertasikan kebijakan luar negeri akan mendukung pandangan-pandangan yang multilateral. Selanjutnya para pembuat kebijakan luar negeri melandaskan keputusan penting dalam pembuatan kebijakan luar negeri berdasarkan intrepertasi opini publik daripada opini publik yang sesungguhnya.³⁰

Opini publik merupakan *input* yang sangat penting untuk keputusan sebuah kebijakan luar negeri. Perilaku kebijakan luar negeri dalam menerima interpretasi opini publik dilakukan untuk memuaskan agenda *unilateralist*³¹ suara minoritas yang membantu melagalitaskan kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang *unilateralist* yang direpresentasikan oleh aktor-aktor penting dan diliput secara besar-besaran dalam media massa secara mudah membuahkan salah persepsi dari opini publik,³² dan ini yang mengarah pada dukungan sebuah kebijakan luar negeri yang *unilateral*.

²⁹ Alexander Todorov & Anesu N. Mandisodza. *op. cit*

³⁰ Ibid.

³¹ Ibid.

³² Ibid.

Publik mendapatkan informasi atau pengetahuan mengenai kebijakan luar negeri dari berbagai media yaitu media massa (cetak maupun elektronik), buku, film, internet (email dan blog) serta selebaran. Media massa terbagi menjadi dua yaitu cetak dan elektronik, media massa elektronik lebih efektif menjangkau publik karena bersifat audio visual yang lebih disenangi oleh publik. Namun media massa elektronik merupakan saluran komunikasi yang paling efektif, karena komunikasi yang terdapat dalam media massa bersifat dinamis, mengikuti perkembangan jaman seiring dengan arus globalisasi.³³ Publik mendapatkan berita dan gambaran langsung mengenai suatu informasi. Hal ini menyebabkan informasi mengenai pemerintahan negara (termasuk resolusi dan/atau kebijakan luar negeri) banyak didapatkan publik Amerika Serikat melalui televisi. Demikian pula dalam kasus invasi Irak tahun 2003, televisi digunakan secara maksimal oleh pemerintah Amerika Serikat. Kenyataan bahwa 90% penduduk Amerika Serikat menonton televisi untuk laporan-laporan apa saja yang menyangkut terorisme dan perang setelah kejadian 11 September 2001³⁴ membuat peranan pemberitaan dalam televisi menjadi sangat kuat.

Formulasi kebijakan luar negeri merupakan proses politik yang dipengaruhi beragam faktor ekonomi³⁵ dan sistem media memainkan peran integral dalam membentuk konteks sosial dimana kebijakan berkembang. Dengan melalui media massa, publik diharapkan nantinya menjadi paham akan pengaruh dari kebijakan luar negeri negaranya terhadap mereka dan juga pemerintah mendapatkan *feedback* dari program-program serta kebijakan luar negeri yang mereka buat. Posisi media massa sebagai penyalur utama bagi mereka yang ingin memberikan pengaruh terhadap suatu kebijakan pemerintah dan kepada para pembuat kebijakan, mengatur regulasi dari aliran informasinya.

Dalam kasus yang diangkat oleh penulis, asumsinya dengan adanya insiden 11 September 2001, merupakan pembenaran untuk membuat kebijakan luar negeri Amerika Serikat untuk menyerang Irak dan melanjutkan kebijakan untuk “menyerang terlebih dahulu”.³⁶ Melalui sudut pandang ini, publik Amerika Serikat

³³ Alexander Todorov & Anesu N. Mandisodza. *op. cit*

³⁴ Pew Research Center, *Terror Coverage Boost News Media's Images*, November 28, 2001 <<http://people-press.org/reports/display.php3?ReportID=143>> (diakses 24 Februari 2009)

³⁵ Hofferbert, R. I. *The study of public policy*. Indianapolis: Bobbs-Merrill, Tahun 1974

³⁶ Josh Klein, *Rhetorically Associating Democracy and War: The Iraq Case*. New Rochelle, New York. 2004

dengan diawali oleh trauma yang sangat dalam serta rasa nasionalis yang memiliki keinginan untuk membalas atau melawan kelompok teroris Al-Qaeda yang mengaku bertanggung jawab atas tragedi 11 September 2001 menjadi alasan kuat untuk mendukung perang dimasa yang akan datang. Perspektif publik ini yang menjadi penguat dukungan publik terhadap resolusi Irak.

Resolusi Irak secara formal disebut sebagai “*The Authorization for Use of Military Force Against Iraq Resolution of 2002*” dibuat pada 16 Oktober 2002, yang menjadi hukum publik dikeluarkan oleh Kongres Amerika Serikat pada bulan Oktober 2002 untuk otorisasi Perang Irak.³⁷ Di dalam resolusi Irak tersebut disebutkan berbagai faktor yang menjadi alasan yang mendorong perlunya justifikasi untuk menggunakan kekuatan militer Amerika Serikat terhadap Irak.³⁸ Diantaranya berisikan:

- Ketidapatuhan Irak terhadap persyaratan PBB.
- Dugaan adanya senjata pemusnah masal Irak, dan juga dugaan adanya program-program Irak untuk pengembangan senjata pemusnah masal.
- Saddam Hussein dianggap telah melanggar HAM (Hak Asasi Manusia) terhadap warga negara Irak.
- Kemampuan Irak dan kemauan Irak menggunakan senjata pemusnah masal.
- Sikap Irak yang menunjukkan permusuhan terhadap Amerika Serikat.
- Irak merupakan anggota dari kelompok teroris Al-Qaeda.
- Irak membantu organisasi teroris internasional.
- Upaya Kongres Amerika Serikat dan Presiden Amerika Serikat melawan teroris termasuk kelompok teroris yang melakukan serangan 11 September 2001.
- Adanya otorisasi kepada Presiden untuk melawan siapa saja terorism anti-Amerika Serikat.
- Kongres Amerika Serikat yang menginginkan perubahan rezim di Irak.

³⁷ Authorization for Use of Military Force Against Iraq Resolution of 2002 <<http://www.c-span.org/Content/PDF/hjres114.pdf>> (diakses 05 Mei 2009)

³⁸ Pidato Presiden Bush pada House Leadership Agree on Iraq Resolution. <<http://georgwbush-whitehouse.archives.gov/news/release/2002/10/print/20021002-7.html>> (diakses 07 Mei 2009)

Resolusi Irak telah didukung dan didorong pembuatannya oleh Presiden Bush agar supaya diterima oleh dewan PBB dan dewan-dewan keamanan lainnya. Dalam resolusi Irak, Presiden Bush diberikan otorisasi untuk menggunakan militer Amerika Serikat, karena bagi Bush hal ini dianggap sangat diperlukan mengingat ancaman Irak yang datang terus-menerus. Otorisasi tersebut diminta oleh Presiden George Walker Bush pada tanggal 12 September 2002, dalam pengajuan Resolusi Irak Bush mengatakan:

*“With every step the Iraqi regime takes toward gaining and deploying the most terrible weapons, our own options to confront that regime will narrow. And if an emboldened regime were to supply these weapons to terrorist allies, then the attacks of September the 11th would be a prelude to far greater horrors.”*³⁹

Kutipan diatas penulis peroleh dari artikel di Global Politician oleh Gina dan Marie Cheesman, dalam artikel tersebut, Gina dan Marie menyimpulkan bahwa pernyataan Bush yang menyebutkan Irak di kalimat pertama kemudian menyebutkan 11 September 2001 pada kalimat berikutnya mengansumsikan kalau Bush menyatakan secara tidak langsung bahwa Irak terlibat dalam serangan teroris tanggal 11 September 2001.⁴⁰

Pandangan tersebut menjelaskan bahwa konstruksi sosial mengenai perang merupakan propaganda dan proses ideologi.⁴¹ Sebuah penelitian menunjukkan bahwa reportase sebuah media massa secara kritis dan dibungkus sebagai “intervensi“ memiliki peran yang sangat kuat untuk membentuk resolusi dan/atau kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Ketika pembuat kebijakan kurang yakin dengan aksi mereka dan sebaliknya memiliki peran yang lemah ketika pembuat kebijakan telah menetapkan aksinya.⁴²

Peran dari media massa di dalam kebijakan luar negeri di negara manapun, berkaitan erat dengan opini publiknya, sejauh mana publiknya mengetahui apa yang

³⁹ Gina-Marie Cheesman. *Reasons to Impeach President George W. Bush*. 27 September 2007. <<http://www.globalpolitician.com/23523-bush>> (diakses 12 Juli 2009)

⁴⁰ Ibid.

⁴¹ Pidato Presiden Bush pada House Leadership Agree on Iraq Resolution, op.cit.

⁴² D. C Hallin. *The "uncensored war": the media and Vietnam*. New York: Oxford University Press, Tahun 1986

dilakukan dalam hubungan luar negeri negaranya.⁴³ Pemerintah memiliki obligasi untuk menginformasikan kepada publik, mengenai segala komitmen dan juga aktivitas negara dalam sistem internasional, pada akhirnya akan mendapat keuntungan dari dukungan publik yang dapat merealisasikan tujuan negara dalam kebijakan luar negerinya. Di sisi lain, publik memiliki hak untuk memonitor perilaku pemerintahnya agar dapat memastikan bahwa perilaku negaranya segaris dengan aspirasi publik. Sedangkan media massa, memiliki peran penting untuk membentuk opini publik dan menghubungkan publik dengan pemerintahnya. Dengan keterangan tersebut menjelaskan peran penting media massa yang sangat dibutuhkan oleh Amerika Serikat untuk melanjutkan resolusi yang diajukan Bush kepada Kongres dan Senat.

Amerika Serikat tidak bisa serta merta menggunakan kekuatan militer (*Use of Force*) untuk operasi perang tanpa adanya dukungan dari Kongres, sedangkan Kongres sendiri merupakan wakil dari suara rakyat sehingga opini publik untuk mendukung penyerangan tersebut sangat dibutuhkan. Dalam kasus invasi Irak 2003, Kongres dan juga Bush mendapatkan legalitas dikarenakan dukungannya. Bush mengajukan Resolusi Irak (*The Authorization for Use of Military Force Against Iraq Resolution of 2002*) berdasarkan hasil laporan dari Intelijen yang menyangkut beberapa poin, antara lain⁴⁴:

- *Intelligence Community Analysis of Iraq's Nuclear Program;*
- *The Rapid Production of the October 2002 National Intelligence Estimate on Iraq's Continuing Programs for Weapons of Mass Destruction ;*
- *Iraq's Links to Terrorism ;*
- *Iraq's Threat to Regional Stability and Security ;*
- *Saddam Hussein's Human Rights Record.*

Dalam memperoleh dukungan publik, Presiden Bush menggunakan media massa yang *right-wing* (Fox News) untuk menjadi sebuah strategi untuk aksi dan

⁴³ Sethi Kamuhada, *The Role of the Mass Media in the Implementation of Tanzania's Foreign Policy: Reality and Prospects*. <<http://archive.lib.msu.edu/DMC/African%20Journals/pdfs/africa%20media%20review/vol3no3/jamr003003003.pdf>>

⁴⁴ Congressional Reports: Report of the Select Committee on Intelligence on the U.S. Intelligence Community's Prewar Intelligence Assessments on Iraq. <<http://www.gpoaccess.gov/serialset/creports/iraq.html>> (diakses 27 Desember 2009).

kebijakan kepada publiknya⁴⁵ yang dapat memperkuat justifikasi dan menciptakan dukungan opini publik terhadap invasi ke Irak pada tahun 2003. *Polling* opini nasional di Amerika Serikat menyimpulkan bahwa Presiden Bush dapat melipatgandakan jumlah dukungan publik untuk invasi (hingga 70%) dari enam bulan menuju aksi militer pada bulan Maret 2003.⁴⁶

Keterangan di atas menjadi kejanggalan bagi penulis karena ternyata ditemukan dari hasil komunitas intelijen yaitu bahwa Irak dan Saddam Hussein tidak secara langsung berhubungan dengan serangan teroris yang terjadi pada tanggal 11 September 2001, dan juga tidak ada hubungan kerjasama yang *solid* antara Irak dan Al-Qaeda pada bulan-bulan menjelang serangan terhadap Amerika Serikat di tahun 2001. Namun dari *polling* terdapat angka yang signifikan bahwa publik Amerika Serikat mempercayai Saddam Hussein dan Irak terlibat dengan aksi serangan teroris tersebut. 68% opini publik menyatakan bahwa Irak terlibat secara signifikan dan hanya 13% yang menyatakan (secara keliru) bahwa terdapat “bukti yang konklusif”. Keterangan ini didapatkan dari *polling Program on International Policy (PIPA)/KN* bulan Januari 2003.

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai opini publik Amerika Serikat, PIPA/KN melakukan *polling* kembali. *Polling* tersebut menghasilkan bahwa Irak dan Al-Qaeda dianggap berhubungan langsung, 57% mempercayai hubungan tersebut walaupun tidak ada bukti nyata.⁴⁷ *Polling* ini bagi Amerika Serikat sangatlah penting, karena Amerika Serikat menganut sistem demokrasi, sehingga harus mendengarkan opini publiknya dalam kebijakan baik dalam negeri maupun luar negerinya. Dalam menyampaikan tujuan kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang menginginkan untuk menggunakan kekuatannya terhadap Irak, maka Amerika Serikat membutuhkan media massa sebagai penjabatannya kepada publik.

Dari latar belakang yang telah dipaparkan oleh penulis di atas, terlihat dari hasil *polling* bahwa media massa berhasil mempengaruhi opini publik, meskipun tidak ada bukti nyata hubungan antara Irak dan Al-Qaeda, namun publik tetap berkeyakinan hubungan tersebut ada. Selanjutnya penulis akan merumuskan

⁴⁵ Mintz, A. & Redd, S.B. *Framing effects in international relations. Synthese*, 135, Tahun 2003. h. 193-13.

⁴⁶ Schlesinger, J.M. dan Cummings, J. *To beat president, Democrats hone a 5-point attack. The Wall Street Journal*, Tahun 2003. h. A1, A8.

⁴⁷ Steven Kull. *op. cit.*

permasalahan propaganda yang dilakukan oleh media massa Fox News untuk mendukung resolusi Bush menggunakan kekuatan militer Amerika Serikat terhadap Irak.

1.2 Permasalahan Penelitian

Setelah Goerge Walker Bush menjadi Presiden Amerika Serikat pada tahun 2001, dan terlebih lagi setelah insiden 11 September 2001, pemerintah Amerika Serikat meningkatkan perhatiannya pada Irak. Hingga pertengahan 2002, terdapat beberapa pernyataan dari Bush dan anggota administrasinya yang mengindikasikan keinginan untuk menggunakan kekuatan militernya (jika diperlukan) untuk menggulingkan pemerintahan Saddam Hussein. Presiden Bush mengangkat isu Irak secara formal pada tanggal 12 September 2002 kepada PBB menyangkut keberatannya akan pemerintahan Irak.

Irak dianggap mendukung organisasi teroris yang melakukan kejahatan terhadap Iran, Israel dan pemerintahan Barat mencurigai teroris Al-Qaeda yang berhasil melarikan diri dari Afganistan berada di Irak; Irak dinilai telah melanggar HAM; dan produksi Irak dalam *Weapons of Mass Destruction* (WMD) merupakan pelanggaran terhadap resolusi PBB. Pada 1 Oktober 2002, pihak CIA memberitakan dokumen rahasia dari *National Intelligence Estimate* (NIE) yang berisi adanya ancaman dari Irak karena Irak dipercayai mempunyai WMD. Sejak saat itu hampir seluruh media massa di Amerika Serikat membahas Irak. Selain isu Irak memiliki WMD, Irak juga diyakini terkait dengan organisasi teroris (Al-Qaeda). PBB mengabulkan permintaan Bush untuk mengambil tindakan terhadap Irak atas dasar alasan produksi terhadap WMD saja pada tanggal 8 November 2002.

Pada Januari 2003 polling CBS menunjukkan bahwa 64% warga AS mendukung aksi militer AS terhadap Irak, 63% menyarankan adanya pendekatan diplomasi daripada penyerangan, 62% mempercayai akan adanya peningkatan kegiatan teroris apabila perang dilakukan.⁴⁸

Insiden teroris 11 September 2001 yang sangat memukul masyarakat dunia pada umumnya dan Amerika Serikat khususnya menciptakan rasa *paranoia* terhadap terorisme. Pada kasus 11 September 2001, kelompok teroris Al-Qaeda dianggap

⁴⁸ 2003 invasion of Iraq. <http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/en/2003_invasion_of_Iraq> (diakses 20 Juli 2009). Diterjemahkan oleh penulis.

menjadi “musuh” masyarakat Amerika Serikat. Dengan adanya isu keterkaitan hubungan kerjasama Irak dengan Al-Qaeda dan adanya indikasi bahwa Irak memiliki WMD menciptakan *image building* yang negatif dimata publik Amerika Serikat. Dukungan publik agar Amerika Serikat menggunakan kekuatan militernya untuk menggantikan pemerintahan Saddam Hussein sangat tinggi. Dukungan yang tinggi ini tidak luput dari peran Fox News sebagai media dalam memberitakan *image* Irak pada saat itu. Peran Fox News dapat dilihat dari hasil polling yang menunjukkan perbedaan yang signifikan disaat sebelum dan setelah invasi terjadi.

Perbedaan persepsi semacam ini menjadi sangat berbahaya, seperti halnya yang telah terjadi pada tahun 2003 dimana Amerika Serikat melakukan invasi ke Irak. Kongres menyetujui langkah pemerintahan Presiden Bush untuk menggunakan kekuatan militer dalam menjatuhkan pemerintahan Saddam Hussein juga karena bentuk dukungan publik yang saat itu banyak mengalami salah persepsi akibat sumber media massanya terlebih Fox News. Dapat dilihat bahwa Fox News dapat menyebabkan distorsi komunikasi. Media masa seharusnya menjadi independen dan tidak boleh bias. Biasanya pemberitaan mengenai Irak sehingga menciptakan pencitraan Irak yang negatif menjadi bukti telah terjadinya distorsi komunikasi, penyampaian informasi secara tidak seimbang menyebabkan publik beropini tidak obyektif.

Fox News yang merupakan *right wing* menjadi sangat berbahaya dalam dunia hubungan internasional, karena Perang Irak menjadi contoh bahwa media massa bisa terlibat dalam propaganda politik dan didukung oleh publik. Perang maupun invasi atau apa saja sebutannya seharusnya bisa terhindarkan karena menyangkut nyawa manusia. Fox News yang memiliki akar struktural yang berkaitan erat dengan Bush menyebabkan Fox News menjadi mitra yang tepat untuk menyampaikan informasi ke publik sesuai dengan keinginannya Bush, opini publik yang mendukung keputusan Bush akibat pemberitaan Fox News. Publik menjadi mendukung resolusi Irak atau mendukung keputusan Bush menyerang Irak di tahun 2003. Hal ini menjadi menarik untuk dibahas mengingat opini publik telah berhasil dipengaruhi oleh Fox News dalam dukungannya terhadap resolusi Irak. Penulis merasa penting membahas propaganda Fox News mengingat pengaruhnya terhadap hubungan internasional dalam kasus Invasi Irak 2003. Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka

pertanyaan yang diajukan penulis dalam penelitian ini adalah: “*Bagaimana teknik-teknik propaganda yang diterapkan oleh media massa Fox News sehingga terbentuk opini publik yang mendukung resolusi Irak tahun 2002?*”

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peranan media massa Fox News dalam mempengaruhi opini publik untuk mendukung resolusi Irak tahun 2002 melalui propaganda, yaitu:

- Untuk mendeskripsikan sikap media massa Fox News terhadap resolusi Irak tahun 2002.
- Untuk melihat pengaruh pemberitaan media massa Fox News terhadap opini publik Amerika Serikat berkaitan dengan resolusi Irak tahun 2002 yaitu keputusan Amerika Serikat menginvasi Irak tahun 2003.

1.4 Tinjauan Pustaka

Ide untuk penelitian ini berawal dari sebuah tulisan dengan judul "*The End of Journalism?*" oleh Budhiana Kartawijaya dalam *Pikiran Rakyat* tanggal 21 Juli 2002. Dalam tulisannya, Budhiana menyertakan sejumlah fakta yang menunjukkan bahwa media "mempermainkan pikiran masyarakat", media dianggap memperkeruh keadaan dengan berita-berita yang mereka keluarkan yang dapat menjerumuskan masyarakat.⁴⁹ Media bagi Budhiana seharusnya memiliki idealisme dan tidak bisa dimasukkan dalam "kancah bursa saham". Tulisan Budhiana tersebut selaras dengan pemikiran Noam Chomsky dan Edward Herman dalam bukunya yang berjudul "*Manufacturing Consent*" tahun 1988.

Chomsky dan Herman menggambarkan kekhawairan mereka akan adanya gerakan masyarakat kapitalis-liberal, yang mulai "kerjasama" dengan gaya propaganda-new. Mereka melihat gejalanya dimulai ketika bisnis media mulai diatur oleh tokoh-tokoh yang punya kekuasaan dan harta. Para elite kekuasaan dan elit bisnis berkolaborasi mengatur isi media. Akibatnya, kebebasan pers, yang awalnya dijiwai asas demokrasi dari liberalisme, telah disusupi corong-corong propaganda

⁴⁹ Budhiana Kartawijaya, "The End of Journalism?". *Pikiran Rakyat* 21 Juli 2002.

sekelompok manusia. Setiap isu atau informasi telah disusupi kepentingan tertentu, setiap suara berita telah dimodali kekuatan politik dan bisnis.

Chomsky pada tahun 1987 mulai menganalisa adanya konspirasi para elite yang melakukan kontrol pemberitaan dan informasi. Media menjadi alat kepentingan politik, ekonomi, militer dan kultur kalangan eksklusif *National Security State*. Para penjaga gawang (*gatekeepers*) media menjadi pion *profit-making* politisi dan industriawan. Dengan kata lain, politik bisnis media mengatur pemberitaan sesuai keinginan pejabat (atas nama kepentingan bangsa) dan pedagang (atas dasar pertumbuhan ekonomi).

Penelitian ini ingin menggali lebih dalam propaganda yang dilakukan oleh media massa terhadap opini publik yang dapat berdampak negatif terhadap hubungan internasional. Penulis mengambil contoh kasus invasi Amerika Serikat terhadap Irak tahun 2003 berdasarkan polling yang dilakukan oleh CBS⁵⁰. Polling tersebut menunjukkan banyaknya publik yang salah persepsi akan citra Irak karena media massa (Fox News) telah membentuk citra Irak menjadi negatif sehingga publik Amerika Serikat menyetujui keinginan Presiden Bush untuk menggunakan kekuatan militernya terhadap Irak. Penulis ingin menggali propaganda apa saja yang dilakukan Fox News dengan melakukan analisis terhadap kegiatan-kegiatan propaganda yang telah dilakukan oleh media massa Fox News dalam periode waktu tahun 2002 yang menyebabkan dukungan publik Amerika Serikat terhadap resolusi Irak yang diajukan Presiden Bush kepada Kongres dan Senat di tahun 2002.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

- Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai gambaran mengenai masalah media bias atau keberpihakan media yang berkaitan dengan resolusi Irak tahun 2002. Hubungan erat antara media dengan pemerintah dapat menyebabkan ketidak-obyektifan.

⁵⁰ Lihat h.12

- Secara Praktis

Dengan penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan atau penyegaran kepada publik tentang pengaruh media yang sangat besar. Publik diharapkan kritis dan tidak menerima pemberitaan informasi media secara langsung tanpa ditelaah.

Penelitian ini juga diharapkan menjadi masukan bagi pengkaji politik agar menggunakan sumber dari media massa yang beragam perspektif agar mendapatkan gambaran opini publik yang lebih obyektif.

1.6 Kerangka Konseptual

Tujuan utama studi hubungan internasional adalah mempelajari perilaku internasional yaitu perilaku aktor, negara maupun non-negara, dalam masyarakat internasional. Perilaku ini bisa berujung perang, konflik, kerja sama, pembentukan aliansi, interaksi dalam organisasi internasional dan sebagainya. Hubungan internasional itu sangat kompleks karena di dalamnya terlibat bangsa-bangsa yang masing-masing berdaulat dan setiap segi hubungan ini melibatkan berbagai segi lain yang koordinasinya tidak sederhana, sehingga memerlukan mekanisme yang lebih rumit dari pada hubungan antar kelompok manusia di dalam suatu negara.⁵¹

Hubungan Internasional diidentifikasi sebagai hubungan global yang meliputi semua hubungan yang terjadi melampaui batas kenegaraan. Dalam artian bahwa hubungan tersebut tidak hanya tunduk pada ketentuan hanya dari satu negara saja, melainkan juga berada di luar kontrol yang dapat tercipta melalui hubungan antar pemerintah.⁵² K.J Holsti menyatakan bahwa Hubungan Internasional adalah sebuah bentuk interaksi dalam berbagai aspek internasional yang melewati batas negara antara anggota masyarakat yang berbeda, baik yang didukung dan bertindak atas nama pemerintah atau tidak.⁵³ Awalnya, konsep studi Hubungan Internasional hanya memfokuskan diri pada aspek politik saja. Akan tetapi sejalan dengan perkembangan dunia, ternyata aspek-aspek yang lain seperti ekonomi, keamanan

⁵¹ Mochtar Mas' oed, *Ilmu Hubungan Internasional, Disiplin dan Metodologi*, LP3S:1994, h. 28.

⁵² Budiman Kusumohamidjojo. *Hubungan Internasional: Kerangka Studi Analisis*. Binacipta, Jakarta, 1987, h. 11.

⁵³ K.J.Holsti. *Politik Internasional: Suatu Kerangka Analisis*, C.V Rajawali, Jakarta, 1990, h. 80.

serta sosial budaya juga merupakan suatu hal yang tidak kalah penting dan memiliki pengaruh yang cukup besar di dunia internasional.

Kita hidup di dalam suatu Sistem Internasional di mana segala sesuatu dapat dilakukan melewati batas negara. Sehingga pada akhirnya globalisasi menjadi bagian yang tidak dapat terelakkan dari Sistem Internasional tersebut. Berkat globalisasi, kejadian di suatu belahan negara dapat diketahui dengan cepat dan dapat mempengaruhi segala aktivitas di belahan negara lainnya.⁵⁴ Globalisasi sendiri lebih merujuk pada artian suatu proses dimana hubungan sosial relatif menjadi saling berhubungan secara wilayah geografisnya, sehingga peranan manusia menjadi lebih menonjol.⁵⁵ Globalisasi tidak hanya terjadi di bidang ekonomi, tetapi juga di bidang sosial, budaya, politik dan sebagainya. Sistem Internasional adalah suatu bentuk interaksi-interaksi dari unit-unit. Unit didalam kajian Hubungan Internasional adalah aktor-aktor yang saling berinteraksi. Aktor Hubungan Internasional bisa dikategorikan menjadi⁵⁶:

1. Negara / *State Actor*.
2. Aktor non negara / *Non State Actor*, yaitu Organisasi Internasional dan *Non Governmental Organization*.
3. Individu.

Dewasa ini, paling tidak terdapat empat perubahan mendasar yang turut menentukan wujud tatanan politik dunia. Pertama, kecenderungan ke arah perubahan dalam konstelasi politik global, dari suatu kerangka bipolar ke kerangka multipolar. Kedua, menguatnya gejala saling ketergantungan antarnegara dan saling keterkaitan antar masalah global di berbagai bidang, baik politik, keamanan, ekonomi, sosial, dan lain-lain. Ketiga, meningkatnya peran aktor-aktor non-pemerintah dalam tata hubungan antarnegara. Keempat, munculnya isu-isu baru dalam agenda internasional seperti masalah hak asasi manusia, demokrasi, *good governance* dan lain-lain.⁵⁷

Perubahan mendasar yang ketiga, yang menyebutkan bahwa peran aktor-aktor pemerintah dalam hubungan antar negara semakin meningkat, sesuai dengan

⁵⁴ John Baylis dan Steve Smith. *The Globalization of World Politics: An Introduction to International Relations*, Oxford University Press, 2001, h.14.

⁵⁵ Jan Aart Scholt. *The Globalization of World Politics*, Oxford University Press, 2001, h. 14.

⁵⁶ Paul R Viotti dan Mark V. Kauppi. *International Theory; Realism, Pluralism, Globalism: Pluralism, Decision Making, Transnationalism & Interdependence*, Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey, h. 192

⁵⁷ Ibid. h. 163.

pandangan pluralisme. Paradigma pluralisme ini memiliki beberapa asumsi mendasar yang menyebutkan⁵⁸:

1. Dipahami bahwa aktor-aktor non-negara merupakan bagian yang penting dalam hubungan internasional. Peran para aktor tersebut menentukan agenda-agenda politik berdasarkan berbagai isu yang diperjuangkan.
2. Dipahami pula bahwa negara bukan aktor tunggal/unit.
3. Kaum pluralis menentang asumsi kaum realis yang menyatakan bahwa negara merupakan aktor rasional. Menurut pluralis, adanya konflik kepentingan, *bargaining* dan perlunya kompromistis bisa mempengaruhi proses pembuatan kebijakan yang tidak rasional menjadi rasional.
4. Kaum pluralis juga melihat bahwa cakupan agenda-agenda politik internasional sesungguhnya amat luas.

Berdasarkan asumsi-asumsi dari pluralisme tadi, media massa merupakan bagian dari aktor non-negara yang penting dalam hubungan internasional. Dalam pandangan pluralis, peran aktor-aktor non-pemerintah dapat menembus dan mempengaruhi lapisan otoritas negara, dan tidak jarang mengambil tindakan dengan implikasi-implikasi kebijakan yang bertentangan dengan negara. Dalam kebijakan luar negeri, lingkungan eksternal mempunyai pengaruh yang besar dalam menentukan kebijakan suatu negara. Menurut Lenter, lingkungan eksternal terdiri dari lingkungan internasional (*internasional environment*) dan situasi (*situation*).

Karena lingkup dari lingkungan internasional yang begitu luas, penelitian ini lebih difokuskan pada situasi karena melihat aksi yang dilakukan antara aktor yang satu terhadap aktor lain. Menurut Lenter, situasi adalah suatu unit analisis dalam skala lebih besar daripada aktor negara, tetapi lebih kecil dari sistem internasional, walaupun keduanya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain.⁵⁹

Hubungan yang tercipta antara aktor-aktor non-negara dengan aktor negara yang berinteraksi tadi menciptakan apa yang dinamakan dengan komunikasi internasional. Komunikasi internasional adalah komunikasi yang dilakukan antara komunikator yang mewakili suatu negara untuk menyampaikan pesan-pesan yang berkaitan dengan berbagai kepentingan negaranya. Ditujukan kepada komunikan yang mewakili negara lain dengan tujuan untuk memperoleh dukungan yang lebih

⁵⁸ Ibid.

⁵⁹ Mochtar Mas'oe'd, op. cit. h. 5

luas. Komunikasi internasional berfungsi mendinamisasikan hubungan internasional yang dijalin antara dua negara atau lebih.⁶⁰ Komunikasi internasional ini berangkat dari apa yang disebut komunikasi massa.⁶¹

Media massa merupakan saluran komunikasi yang efektif, karena komunikasi yang terdapat dalam media massa bersifat dinamis, mengikuti perkembangan jaman seiring dengan arus globalisasi.⁶² Media massa berhubungan juga dengan sistem yang melingkupinya, mulai dari sistem sosial masyarakat sampai dengan sistem politik pemerintahannya. Dengan kata lain, sistem media berhubungan dengan filosofi politik yang juga memuat fungsi dari media tersebut.

Peran dari media massa juga mampu membuat konsumennya berpersepsi seperti apa yang diinginkannya. Karena adanya persepsi tersebut maka antara berita dan pesan tidak mungkin akan netral karena adanya kebutuhan dari negara untuk mengakomodasi kepentingan politiknya dan kebutuhan masyarakat akan informasi politik yang diterimanya dari pers. Sehingga hubungan yang terjadi antara pemerintah, media massa, dan masyarakat adalah hubungan mutualisme dalam kebutuhan akan informasi politik. Disini media massa berperan penting dalam menjembatani hubungan antara masyarakat dan pemerintah.⁶³

Peran dari media massa lainnya adalah menyampaikan informasi yang dapat menimbulkan opini dari publik, tetapi juga dapat mempengaruhi dan bahkan membentuk opini publik. Definisi opini publik: perantara perubahan sikap dan perilaku sasaran propagandis. Opini publik juga menjadi alat yang baik untuk mewujudkan propaganda. Opini publik penuh muatan kepentingan pribadi atau kelompok dan sengaja diciptakan untuk mencapai tujuan tertentu. Biasanya dibutuhkan oleh pemerintah untuk menggapai kasus tertentu. Dinyatakan benar, jika sudah ada kesepakatan umum tentang kebenaran sebuah opini.⁶⁴

⁶⁰ Dedy Djamaludin Malik, Jalaludin Rakhmat dan Mohammad Shoelhi. *Komunikasi Internasional*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993, h. v

⁶¹ Onong Uchana Effendy. *Ilmu Komunikasi, Teori dan Praktek*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2003, h. 21.

⁶² Ibid.

⁶³ Onong Uchana Effendy. *op.cit*, h. 146.

⁶⁴ Nurudin. *Komunikasi Propaganda*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2001, h. 21.

Tahapan-tahapan opini publik⁶⁵:

1. Ide-ide
2. Dipropagandakan
3. Pembentukan opini publik
4. Pemantapan opini.

Pembentukan opini publik dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan disengaja; melalui organisasi, media, dan dengan target yang jelas sejak awal. Lalu dimunculkan untuk mempengaruhi opini publik yang sudah berkembang dan meng-*“counter”* opini yang sudah terbentuk. Kemudian secara tidak disengaja; cara ini tidak mempunyai tujuan dan target, muncul secara alamiah dan tidak membutuhkan media yang efektif.

Dari tahapan-tahapan pembentukan opini publik, terdapat satu cara yaitu propaganda. Definisi propaganda menurut Qualter, adalah usaha yang dilakukan secara sengaja oleh beberapa individu atau kelompok untuk membentuk, mengawasi atau merubah sikap dari kelompok-kelompok lain dengan menggunakan media komunikasi dengan tujuan bahwa pada setiap situasi yang tersedia, reaksi dari mereka yang dipengaruhi akan seperti yang diinginkan oleh propagandis.⁶⁶ Propaganda adalah teknik untuk mempengaruhi kegiatan manusia dengan memanipulasi representasinya. Disebutkan pula bahwa propaganda adalah semata-mata kontrol opini yang dilakukan melalui simbol-simbol yang mempunyai arti, atau menyampaikan pendapat yang konkrit dan akurat. Unsur-unsur atau elemen yang terdapat dalam propaganda⁶⁷ yaitu:

1. Adanya komunikator, yang menyampaikan informasi dengan isi dan tujuan tertentu.
2. Adanya komunikan, penerima informasi yang kemudian melakukan sesuatu sesuai dengan pola yang ditentukan komunikator.
3. Kebijakan atau politik propaganda, yang menentukan isi dan tujuan yang hendak dicapai.
4. Pesan tertentu yang telah di *“-encode”* atau dirumuskan sedemikian rupa agar mencapai tujuannya yang efektif.

⁶⁵ Ibid.

⁶⁶ Op. cit. h. 9.

⁶⁷ Ibid. h. 10.

5. Sarana atau media yang tepat dan sesuai dengan situasi komunikasi.
6. Teknik yang efektif, sehingga dapat mempengaruhi komunikasi untuk bertindak sesuai dengan keinginan komunikator.
7. Kondisi dan situasi yang memungkinkan dilakukannya propaganda. Atau dikenal dengan kondisi yang *communicable* dimana komunikasi memberikan perhatian dan minatnya.

Menurut Holsti yang menjadi sasaran propagandis adalah kelompok-kelompok dalam masyarakat. Kelompok yang lebih kecil atau kelompok kategori lebih mudah untuk diubah atau dipengaruhi karena memiliki sikap dan identitas yang sama, misalnya kelas sosial. Sedangkan untuk mengubah penduduk secara nasional lebih sulit daripada mengubah kelompok yang lebih kecil, kecuali jika seluruh anggota masyarakat nasional telah disatukan dengan kuat oleh beberapa nilai seperti mempertahankan kedaulatan dan prestise nasional. Ataupun berhadapan dengan lingkungan yang baru atau dengan pengalaman *traumatic*.⁶⁸

Media yang digunakan dalam menyampaikan propaganda adalah, media massa, buku, film dan selebaran. Dalam propaganda strategi yang diterapkan adalah teknik persuasi sedangkan alatnya adalah simbol. Untuk memanipulasi simbol tersebut, kondisi yang memungkinkan agar suatu propaganda dapat tercapai secara efektif⁶⁹ adalah:

1. Menjamin perhatian yang diberikan *audience*.
2. Kepercayaan yang diberikan *audience* dapat dijamin.
3. Kecenderungan *audience* harus termasuk dalam modifikasi yang dilakukan propaganda sebagai alternatif tampilan yang diharapkan.
4. Lingkungan dari *audience* harus mengizinkan tindakan yang dilakukan dalam waktu yang ditentukan sebagai modifikasi struktur tampilan yang diharapkan.

Tujuan propaganda terbagi lima⁷⁰ yaitu:

1. *Submission*, untuk menjamin tunduknya *audience* yang menjadi sasaran propaganda untuk menandingi kekuatan rivalnya.

⁶⁸ KJ. Holsti. *op.cit.* h. 275

⁶⁹ Daniel Lerner. *Effective Propaganda: Conditions and Evaluations; The Process and Effects of Mass Communication*, Wilbur Schramm, University of Illinois Press Urbana, Urbana, USA, 1961, h. 482.

⁷⁰ R. A. Santoso Sastropetro. *Propaganda: Salah Satu Bentuk Komunikasi Massa*, Penerbit Alumni, Bandung, 1991, h. 54.

2. *Subversion*, dengan melakukan tindakan yang ditujukan untuk menjatuhkan citra lawan.
3. *Cooperation*, untuk membangun kerjasama dengan pihak lain untuk mewujudkan propaganda.
4. *Privatization*, dengan mengadakan tindakan seperti sabotase di dalam negeri, sehingga pihak lawan mudah ditaklukan.
5. *Panic*, untuk mempengaruhi pihak lain dengan menciptakan suasana atau keadaan tertentu.

Seiring dengan berkembangnya politik massa, yaitu perluasan keterlibatan masyarakat atau objek dalam masalah politik. Termasuk hubungan pribadi yang luas di antara masyarakat berbagai bangsa, dimensi psikologis dan opini masyarakat mengenai politik luar negerinya yang menjadi semakin penting.⁷¹ Hal tersebut merupakan perubahan dalam penyebaran pengaruh yang dahulu dilakukan hanya antara para penguasa pemerintahan dan diplomat secara terbatas. Kini masyarakat telah memegang peranan penting dalam menetapkan tujuan dari politik luar negeri suatu negara.

Dalam bukunya “Jurnalistik: Teori dan Praktek”, Hikmat Kusumaningrat dan Purnama Kusumaningrat, menulis mengenai unsur-unsur yang membuat sebuah berita layak dimuat ditetapkan dalam Kode Etik Jurnalistik, yaitu bahwa berita pertama-tama harus cermat dan tepat, berita juga harus lengkap (*complete*), adil (*fair*), dan berimbang (*balanced*). Kemudian berita pun harus tidak mencampurkan fakta dan opini sendiri atau dalam bahasa akademis disebut objektif. Lalu, yang merupakan syarat praktis tentang penulisan berita, tentu saja berita itu harus ringkas (*concise*), jelas (*clear*), dan hangat (*current*). Sifat-sifat istimewa ini sudah terbentuk sedemikian kuatnya sehingga sifat-sifat ini bukan saja menentukan bentuk-bentuk khas praktik pemberitaan tetapi juga berlaku sebagai pedoman dalam menyajikan dan menilai layak tidaknya suatu berita untuk dimuat.

Untuk dapat mengetahui peran media massa dalam hubungan internasional diadopsi pemikiran-pemikiran dari paradigma pluralisme, dengan asumsinya⁷² :

1. Aktor-aktor non negara adalah kesatuan yang penting dalam HI.

⁷¹R. A. Santoso Sastropetro. Op. cit. h. 268.

⁷² Ibid. h. 146

Organisasi internasional tidak hanya berfungsi sebagai forum persaingan dan kerjasama antar negara. Tetapi juga berfungsi sebagai aktor-aktor independen yang mempunyai hak dan kekuatan secara pribadi.

2. Negara bukan hanya aktor yang uniter.

Pluralisme memandang negara sebagai *black box*, yang terdiri dari bagian-bagian pembentuk. Negara bukanlah saluran entitas yang tidak tertembus oleh kekuatan-kekuatan eksternal. Dalam pandangan pluralis, baik aktor-aktor pemerintah maupun non pemerintah menembus lapisan ini, dan tidak jarang mengambil tindakan-tindakan dengan implikasi-implikasi kebijakan yang bertentangan dengan otoritas pusat.

3. Pluralisme menentang asumsi negara sebagai aktor yang paling rasional.

Decision making merupakan suatu proses yang dihasilkan oleh efektivitas pertentangan, tawar menawar dan komponen diantara berbagai aktor yang berbeda-beda.

Propaganda seringkali berkaitan dengan hal-hal yang bersifat politis. Dalam komunikasi, peran media massa sebagai penyampai pesan-pesan yang bersifat politis tersebut akan membentuk opini publik dalam masyarakat. Opini publik yang dikeluarkan masyarakat menanggapi isu-isu politis yang diberitakan oleh media massa merupakan dampak balik (*feedback*) yang dapat bersifat positif dan negatif, dapat juga menimbulkan potensi-potensi konflik maupun kerjasama, eksekusi yang menguntungkan atau merugikan.

Opini publik merupakan kelompok yang tidak terorganisasi serta menyebar di berbagai tempat dengan disatukan oleh suatu isu tertentu dengan saling mengadakan kontak satu sama lain, biasanya melalui media massa.⁷³ Suatu propaganda digunakan untuk mempengaruhi atau mengontrol opini pihak yang menjadi sasaran propaganda. Posisi media massa disini merupakan pembentuk dari opini publik atau layak disebut *opinion leader* karena sebagai aktor yang berperan dalam proses penyebaran berita kepada masyarakat.

Peran dari media massa mampu membuat konsumennya berpersepsi seperti apa yang diinginkannya. Karena adanya persepsi tersebut maka antara berita dan pesan tidak mungkin akan netral karena adanya kebutuhan dari negara untuk

⁷³ Nuruddin, *Komunikasi Propoganda*, penerbit PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2001. h. 55

mengakomodasikan kepentingan politiknya dan kebutuhan masyarakat akan informasi politik yang diterimanya dari pers, sehingga hubungan atau interaksi yang terjadi antara pemerintah, media massa, dan masyarakat adalah hubungan mutualisme dalam kebutuhan informasi politik. Sebagai aktor yang berperan penting untuk menjembatani pemerintah dan masyarakat, media massa terkadang terburu-buru dan “terpaksa” menampilkan diri sebagai *defining agency* untuk mendefinisikan isu atau permasalahan apa yang relevan saat itu menurut versi masing-masing media.

1.6.1 Model Propaganda

Propaganda Model yang dijabarkan oleh Noam Chomsky dan Edward Herman menjelaskan bahwa media massa sebagai propaganda karena memiliki kecenderungan dalam memihak sesuai dengan kepentingan dominan negara dan aktivitas pribadi.⁷⁴ Menurut mereka, propaganda model ini tidak mendominasi arah media massa secara keseluruhan. Chomsky meyakini bahwa sekecil apapun suatu jurnalistik pastilah dikuasai oleh kekuatan kelompok tertentu sehingga tidak memungkinkan untuk netral. Terjadinya “konspirasi” tersebut tidak membutuhkan suatu rencana terperinci melainkan bisa terjadi dengan sendirinya seperti halnya “pasar bebas” dalam menghadapi kebutuhan terkini masyarakat.⁷⁵ Dalam Model Propaganda terdapat filter-filter dimana uang dan kekuatan dapat mem-filter berita yang “*fit to print*” yang memperbolehkan pemerintah menyampaikan pesan sesuai keinginan mereka kepada publik. Filter-filter tersebut dibagi menjadi lima⁷⁶, yaitu:

1. *The size, concentrated ownership, owner wealth, and profit orientation of dominant mass-media firms.*

Pada bagian ini, besar kecilnya organisasi beserta kepemilikannya serta motif bisnis akan sangat berpengaruh terhadap sepaik terjang suatu institusi pers. Secara tak langsung filter pertama ini menjadi mekanisme kontrol terhadap media yang kadang menjadi alat untuk mengamankan sisi bisnis atau sebagai sapi perah penghasil profit semata. Tampilan berita pun akan bisa berpotensi bias dan tak objektif.

⁷⁴ Noam Chomsky; Edward S. Herman, *Manufacturing Consent: op. cit.* h. xxi

⁷⁵ Ibid.

⁷⁶ Ibid. h. 3-31

2. *Advertising.*

Filter kedua yang dapat memengaruhi independensi media adalah advertising (iklan). Unsur iklan menjadi vital sehingga Chomsky dan Herman mengatakan faktor ini sebagai "*license to do business*". Iklan menjadi *revenue* utama bagi pers dan entitas media yang lain. Tanpa itu, nyaris institusi pers tidak bisa menutup biaya operasionalnya. Oleh karena itu, para stakeholder di wilayah ini menjadi penting perannya untuk "diakomodasi" oleh pers.

3. *The sourcing of mass media news.*

Hubungan simbiosis di antara powerful sources dan media terjalin secara alami. Telah diketahui secara umum bahwa media tidak mungkin merekrut reporter dalam jumlah yang banyak sehingga memilih menempatkan para reporter mereka ke tempat-tempat *newsbeat* yang biasanya muncul—dan itu artinya lembaga dan institusi atau personal dari elite penguasa. Lebih jauh kecenderungan untuk memilih elite sebagai narasumber lebih besar karena alasan kredibilitas pers itu sendiri. Nyaris *powerless sources* (rakyat biasa) tidak pernah secara dominan menjadi sumber berita kecuali dalam peristiwa-peristiwa yang negatif seperti tragedi atau bencana.

4. *Flak.*

Filter ini yang merujuk pada segala tanggapan negatif atas pemberitaan media dalam bentuk surat, telepon, petisi, tuntutan hukum, dan legislasi atau regulasi.

5. *Anti-communism.*

Chomsky dan Klahn melihat antikomunisme masih "berfungsi" di era pasca-Perang Dingin dengan istilah yang sudah tergantikan menjadi "*dichotomy of otherness*".⁷⁷

1.6.2 Teknik-Teknik Propaganda

Untuk mengetahui apakah suatu wacana mengandung unsur-unsur propaganda atau tidak, dapat dilihat melalui teknik-teknik yang digunakannya. Dalam penelitian ini, penulis berusaha untuk mengkaji dari wacana berita Fox News, bagaimana propaganda yang dilakukan Amerika Serikat, dengan digolongkan berdasarkan teknik-teknik yang digunakannya.

⁷⁷ Klahn, Jeffery. *A Critical Review and Assessment of Herman and Chomsky's 'Propaganda Model in European Journal of Communication Vol.17 (2)*. Tahun 2002. h. 161

Tujuan dari propaganda selalu melibatkan aksi dari audience yang merupakan sasaran propagandis. Tujuan dasar dari propaganda adalah untuk merubah perilaku sasarannya sesuai yang diharapkan oleh pelaku propaganda, tujuan yang lebih utama adalah mempengaruhi perilaku sasarannya. Berdasarkan penggolongan IOPA (*Institute of Propaganda Analysis*) mengenai teknik-teknik propaganda dijelaskan ke dalam 7 (tujuh) kelompok yaitu⁷⁸ :

1. *Name-Calling* ialah pemberian julukan atau sebutan dalam arti yang buruk dengan maksud untuk menurunkan derajat nama seseorang atau prestise suatu ide di muka umum.
2. *Glittering Generalities* adalah suatu teknik di mana seorang propagandis mengidentifikasikan dirinya, menonjolkan gagasannya dengan segala sesuatu yang serba luhur dan agung.
3. *Testimonials* adalah cara menggunakan nama orang terkemuka yang mempunyai otoritas dan prestise sosial tinggi dalam menyodorkan atau meyakinkan sesuatu hal dengan jalan menyatakan. Misalnya, bahwa hal tersebut didukung oleh orang-orang terkemuka tadi.
4. *Transfer* merupakan ciri-ciri kegiatan propaganda yang menggunakan teknik pemakaian pengaruh dari seseorang tokoh yang paling berwibawa di lingkungan tertentu, dengan maksud menarik keuntungan-keuntungan psikologis dari pengaruh-pengaruh tersebut.
5. *Plain folks* ialah cara propaganda dengan jalan memberi identifikasi terhadap ide, calon pemilih atau hal apa saja yang dipropagandakan sebagai milik rakyat, menyamakan dirinya dengan rakyat.
6. *Card stacking* adalah cara propaganda dengan jalan menonjolkan hal-hal yang dianggap baik saja, sehingga hanya satu sisi saja yang ditonjolkan dan terlihat.
7. *Bandwagon* dilakukan dengan cara membesar-besarkan kesuksesan, keberhasilan yang telah dicapai, dengan maksud untuk menarik simpatisan yang lebih banyak lagi.

⁷⁸ Santoso Sastropoetra, *op. cit.* h. 172-174

Selain teknik-teknik diatas, penulis menambahkan beberapa teknik propaganda menurut sebuah situs bernama Changing Mind, teknik propaganda tersebut adalah⁷⁹:

1. *Character assassination*: Menggunakan teknik yang menyerang dengan mengatakan atau menyebutkan hal-hal yang dapat membuat kesan buruk.
2. *Information management*: Teknik yang menggunakan kumpulan informasi. Informasi tersebut bisa didapatkan dari sumber mana saja dan juga bisa merupakan karangan propagandis.
3. *Stereotyping*: Digunakan dengan mengelompokkan lawan kedalam kelompok *stereotype* yang disukai, menjabarkan kelompok tersebut sebagai ancaman; tidak baik dan negative.

Asumsi Penelitian:

Argumen yang diajukan oleh penelitian ini adalah bahwa Fox News melakukan propaganda dalam pemberitaannya menyangkut ancaman Irak terhadap Amerika Serikat sehingga pemerintahan Amerika Serikat perlu mengambil tindakan tegas. Tujuan Fox News dalam propagandanya adalah mempengaruhi dan/atau membentuk opini publik untuk mendukung resolusi Irak tahun 2002, dan meyakini bahwa pemerintahan Amerika Serikat dibawah George W. Bush mengambil tindakan yang benar untuk menyerang Irak.

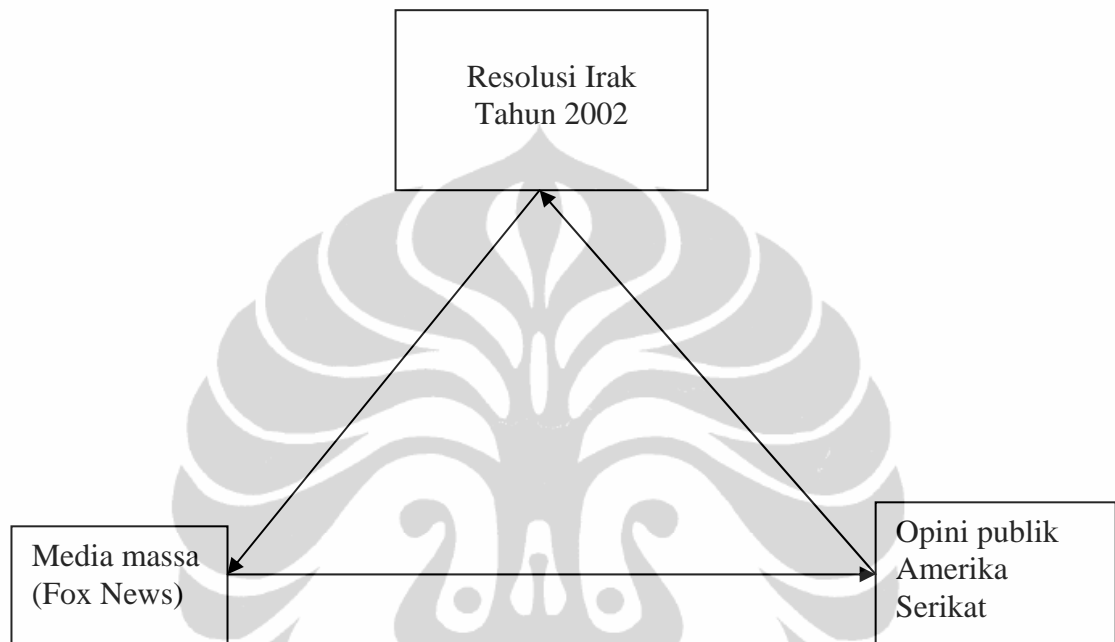
⁷⁹ Propaganda techniques. <<http://changingminds.org/techniques/propaganda/propaganda.htm>> (diakses 20 Juli 2009). Diterjemahkan oleh penulis.

1.7 Operasional Konsep

GAMBAR 1.1

OPERASIONAL KONSEP

Propaganda Fox News dalam mempengaruhi opini publik untuk mendukung resolusi Irak tahun 2002 dapat digambarkan sebagai berikut ini:



Keterangan:

Peran dari media massa di dalam kebijakan luar negeri di negara manapun, berkaitan erat dengan opini publiknya, sejauh mana publiknya mengetahui apa yang dilakukan dalam hubungan luar negeri negaranya.⁸⁰ Pemerintah memiliki obligasi untuk menginformasikan kepada publik, mengenai segala komitmen dan juga aktivitas negara dalam sistem internasional, tentu saja nantinya mendapat keuntungan dari dukungan publik yang dapat merealisasikan tujuan negaranya dalam kebijakan luar negerinya. Di sisi lain, publik memiliki hak untuk memonitor perilaku pemerintahnya agar dapat memastikan bahwa perilaku negaranya segaris dengan aspirasi publik. Sedangkan media massa, memiliki peran penting untuk membentuk opini publik dan menghubungkan publik dengan pemerintahnya.

Amerika Serikat sebagai negara demokrasi, menjadikan opini publik sebagai indikasi penting dalam pelaksanaan negaranya. Dalam kasus ini, opini publik

⁸⁰ Sethi Kamuhada. Op. cit.

dibutuhkan untuk mendukung resolusi negaranya. Amerika Serikat menekankan tujuannya menginvasi Irak adalah demi alasan kebaikan yaitu menjaga perdamaian dunia regional Teluk dan juga perdamaian Amerika sendiri dan untuk membebaskan warga negara Irak dari kekuasaan Saddam Hussein yang melakukan terlalu banyak pelanggaran Hak Asasi Manusia terhadap warga Irak. Fox News sebagai organisasi “right wing” mendukung keputusan Presiden Bush dalam mengeluarkan resolusi Irak, sehingga Fox News melakukan propaganda demi untuk mempengaruhi opini publik Amerika Serikat sehingga publik merasa Bush melakukan hal yang benar dan publik mendukung resolusi Irak tahun 2002.

Media massa seperti Fox News banyak mempengaruhi opini publik Amerika Serikat dalam invasi ke Irak tahun 2003. Sebuah penelitian berdasarkan dari tujuh lembaga *polling* di Amerika Serikat menunjukkan bahwa dari Januari 2003 hingga bulan September 2003, mayoritas masyarakat Amerika Serikat mengalami beda persepsi dan hal tersebut sangat berpengaruh terhadap dukungan invasi Amerika Serikat ke Irak pada tahun 2003. *Polling* yang dilakukan oleh *Program on International Policy (PIPA)* di Universitas Maryland dan *Knowledge Networks* menunjukkan bahwa perbedaan persepsi seseorang ditentukan oleh sumber informasi yang didapatkan. Bagi publik yang sumber informasinya dari Fox News cenderung akan salah persepsi dibandingkan dengan mereka yang mendapatkan informasi dari NPR atau PBS.⁸¹

Publik yang mendapatkan sumber berita mengenai rencana invasi Amerika Serikat melalui Fox News terbentuk menjadi publik yang *realis*, mereka mendukung keputusan Amerika Serikat untuk menggunakan kekuatan militernya. Hal ini terjadi terlebih lagi karena adanya kejadian 11 September 2001, segala sesuatu yang berhubungan dengan Al-Qaeda termasuk Irak, harus ditangani dengan baik agar tidak terulang lagi insiden 9/11.

1.8 Metode Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan **pendekatan kualitatif** yaitu pendekatan yang menekankan pada penarikan kesimpulan berdasarkan interpretasi

⁸¹Misperceptions, the Media and the Iraq War . October 2, 2003
<http://www.worldpublicopinion.org/pipa/articles/international_security_bt/102.php> (diakses 21 Maret 2009). Diterjemahkan oleh penulis,.

terhadap fenomena maupun fakta. Proses penelitian kualitatif lazimnya mengikuti pola induktif dimana penelitian diawali dengan pengamatan terhadap sebuah fenomena atau fakta empiris yang spesifik dan unik yang kemudian diterjemahkan menjadi sebuah generalisasi empiris yang pada akhirnya dapat menghasilkan sebuah teori baru mengenai fenomena atau fakta yang diteliti.

Untuk metode penelitian, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif analitis yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, berdasarkan pada fakta dan akurat berdasarkan data-data yang diperoleh untuk mendukung penelitian ini dan untuk menganalisa suatu wacana dan isi pesan media cara pandang atau perspektif yang digunakan media massa itu menentukan isu mana yang akan dipilihnya, menentukan fakta-fakta apa saja yang diambil, dan bagian-bagian mana saja yang perlu ditonjolkan atau dihilangkan, serta hendak dibawa kemana berita tersebut.

Yang menjadi fokus dari penelitian ini untuk dideskriptif analitiskan adalah Fox News dalam masa pra-invasi Irak 2003, dimana Fox News melakukan propaganda untuk mempengaruhi opini publik Amerika Serikat agar mendukung Resolusi Irak tahun 2002.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan menggunakan data sekunder, melalui studi kepustakaan untuk mengumpulkan data-data yang diperoleh dari buku-buku atau rujukan yang diperoleh penulis dari sumber-sumber seperti perpustakaan Pascasarjana HI FISIP-UI, UPDHI FISIP-UI, koleksi pribadi, maupun situs internet, media *on-line*, media cetak, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan masalah penelitian. Pengumpulan data sekunder meliputi literatur yang relevan dengan penelitian berupa buku, ensiklopedia, artikel dari majalah, surat kabar, atau jurnal ilmiah, kliping, siaran pers, serta penelitian yang terdahulu.

1.9 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan diajukan agar penelitian ini dapat tersusun secara teratur dan sistematis. Penyusunan penelitian ini akan dibagi ke dalam lima bagian atau pembabakan sebagai berikut:

BAB 1 merupakan bagian pendahuluan yang menjabarkan latar belakang masalah, permasalahan penelitian, signifikansi penelitian, tinjauan pustaka, manfaat

penelitian, kerangka konseptual, operasional konsep, metode penelitian, sumber data dan teknik pengumpulan data, serta sistematika penulisan laporan penelitian.

BAB 2 merupakan penjelasan sejarah Fox News untuk menggambarkan propaganda yang terjadi. Untuk memudahkan pembaca, penulis membagi bab ini dengan 3 (tiga) alur yaitu: 1. Latar Belakang Propaganda Media Massa; 2. Sejarah Fox News; 3. *Iraq Resolution*. Resolusi tersebut menjadi penting untuk penulis jabarkan karena menjadi titik yang ingin dicapai oleh Fox News dalam propagandanya di tahun 2002.

BAB 3 merupakan analisis terhadap permasalahan penelitian. Bab ini akan menganalisis propaganda-propaganda yang dilakukan oleh Fox News di tahun 2002 yang berkaitan dengan resolusi Irak tahun 2002. Penulis ingin menguraikan faktor internal dan faktor eksternal terjadinya propaganda sehingga opini publik Amerika Serikat terpengaruh oleh citra yang diciptakan oleh Fox News. Dalam bab ini, penulis ingin menggambarkan pengaruh dari propaganda Fox News dan opini publik terhadap resolusi Irak tahun 2002. Penulis menganalisa berdasarkan nara sumber yang dipilih oleh Fox News beserta isi dalam wawancara dan pemberitaan Fox News yang menyangkut keputusan Bush menyerang Irak.

BAB 4 merupakan merupakan bagian penutup yang akan menyampaikan kesimpulan akhir dari analisis dan rekomendasi bagi para peneliti ilmu hubungan internasional khususnya mereka yang berminat untuk melakukan studi atau analisis lanjut terhadap fokus penelitian yang sama dan/atau serupa maupun bagi para pembuat keputusan (*decision makers*) yang berhubungan dengan kebijakan luar negeri Indonesia.